

**EVALUASI RENCANA AKSI
ATAS KINERJA
Tahun Anggaran.2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusun Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) TA.2024. Adapun Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang tertuang dalam evaluasi rencana aksi atas kinerja ini dimaksudkan sebagai penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek.

Demikian Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja ini disusun dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Maret 2024



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.S.i
NIP. 19600831 198103 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	3

BAB II.GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
B. Sumber Daya.....	6
C. Anggaran	7
D. Sarana Pendukung.....	9
E. Kinerja Pelayanan	9

BAB III.EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018

A. Visi dan Misi.....	11
B. Tujuan dan Sasaran	13
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	14
D. Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2018.....	14

BAB IV.PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja TA.2024 merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek (misalnya triwulanan). Evaluasi Rencana Aksi sekurang-kurangnya memuat kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai kinerja beserta anggaran yang tersedia yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui berbagai kegiatan tiap tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
17. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan dengan berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi, dan prioritas serta kebutuhan daerah bagi pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Evaluasi Rencana Aksi juga dimaksudkan sebagai bentuk sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja ini adalah :

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- c. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan.

D. Ruang Lingkup

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam ruang lingkungnya terbagi dalam 6 bidang, yaitu: **“Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan UPTD PPA”**.Selanjutnya Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana SKPD Provinsi Lampung.
- b. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif.
- c. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota
- d. Melakukan Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual, KDRT, Pemerkosaan, Penculikan dan Pencabulan.
- e. Melakukan Inisiasi terhadap Kabupaten/Kota perihal Kabupaten/Kota Layak Anak.

B A B II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai ***Fungsi:***

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan hasil pemetaan Tipe adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
 - c. Seksi Kualitas Keluarga
4. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Seksi Data dan Informasi Gender
 - b. Seksi Data dan Informasi Anak
 - c. Seksi Partisipasi Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dari KDRT
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan TPPO
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan Dari Situasi Khusus dan Darurat
6. Bidang Tumbuh Kembang Anak
 - a. Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
 - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - c. Seksi Perlindungan Anak
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Keluarga Berencana
 - c. Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat

8. UPTD PPA

- d. Seksi Penatausahaan
- e. Seksi Pelayanan Pengaduan
- f. Seksi Tindak Lanjut

B. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung didukung oleh 74 orang yang terdiri dari 66 PNS dan 8 PTHL yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah 34 orang yang diikuti oleh latar belakang pendidikan S2 jumlah 20 orang. Sedangkan untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SMA berjumlah 19 orang dan D3 berjumlah 3 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMA	8	7	4	-	18
2.	SMP		-	-	-	0
3.	D-III	2	1	-	-	3
4.	S1	13	19	1	1	34
5.	S2	4	16	-	-	19
		Jumlah				74

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dengan jumlah 43 orang yang diikuti golongan II dengan 16 orang dan golongan IV dengan jumlah 12 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	9	7	15
2	Golongan III	14	29	42
3	Golongan IV	8	4	12
Jumlah				69

C. Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2024 memiliki 9 Program dan 22 Kegiatan, 40 Sub. Kegiatan antara lain sebagai berikut :

I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.821.679.243
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.217.565.243
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.739.090.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.902.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.850.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	815.272.000
II.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	648.098.000
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	109.298.000
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	375.850.000
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	162.950.000

III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	879.980.000
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	536.500.000
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	235.480.000
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	198.000.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	140.852.000
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	140.852.000
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	175.850.000
1.	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	175.850.000
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	472.200.000
1.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	472.200.000
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.520.000
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	122.500.000
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	69.020.000
VIII	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	59.800.000
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.800.000

IX.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	73.470.000
1.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	73.470.000
X.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	179.200.000
1.	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	115.200.000
2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	64.000.000

D. Sarana Pendukung

Tabel 2.3 menunjukkan kondisi sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	✓		1
2	Mini Bus	✓		4
3	Sepeda Motor	✓		2
4	Lemari Besi	✓		2
5	Brankas	✓		1
6	AC	✓		11
7	Televisi	✓		6
8	Kamera	✓		2
9	Laptop	✓		15
10	Printer	✓		13
11	PC Komputer	✓		8

E. KINERJA PELAYANAN

Dalam kurun waktu 2019-2024 Dinas PP&PA Provinsi Lampung telah menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Misi Ke-3 (Tiga) yang pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada beberapa program :

1. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Perempuan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT dan Korban Pelecehan Seksual
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
5. Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
6. Peningkatan Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
7. Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki 10 Program dengan 22 Kegiatan. 42 Sub Kegiatan Adapun Program Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

B A B III

EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2024

A. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dalam RPJMD adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Visi diatas mengandung arti bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah yang Maju dan Berdaya Saing. Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*. Kemajuan mencakup dominan perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani. Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung mana kala dapat mendorong kebijakan, memfasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan yang bersih bebas korupsi (*clean government*) dengan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good government*) yang berorientasi pelayanan publik secara prima.

Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah harus dapat memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan publik adalah: prosedur pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi, serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi. Menjadi Provinsi yang makmur diantara Provinsi di Indonesia adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman untuk menjadi Lampung makmur memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Namun karena pemahaman kemandirian bukanlah keterisolasian maka ketergantungan pada wilayah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Provinsi Lampung Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur. Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik.

Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (lima) misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.**
4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke tiga **Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas.** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender dan Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender , pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3,20
		Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	68,24

Dari Tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai berikut :

- Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
 - b. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20
		b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	100	100	100	100
		c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	a. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24

D. EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2024

Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka Triwulanan yang menggambarkan tingkatan capaian dari Sasaran Strategis sampai dengan realisasi pelaksanaan yang dijabarkan melalui table 3.3 sebagai berikut.

I. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Sub. Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas. Program ini sesuai dengan agenda kerja utama ke 21 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2024 yaitu Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga ;

I.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke 1

Pembuatan surat-menyurat dan pembuatan SK Kegiatan

II. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Sub. Kegiatan Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi. Program ini sesuai dengan Agenda Kerja Utama Ke 21 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2024 yaitu. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi

II.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke 1

Pelaksanaan Pembuatan Surat-menyurat dan Persiapan kelengkapan Administrasi

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS),

1. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK.

Program ini sesuai dengan Agenda Kerja Utama Ke 21 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2024 yaitu. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga ;

I.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke 1

Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi dan Belanja Souvenir Kegiatan

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga dan Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan

Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

2.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I

Belanja Adminstrasi Kegiatan dan Pembuatan Surat-menyurat dan Belanja Sovenir Kegiatan

IV. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini sesuai dengan Agenda Kerja Utama Ke 26 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2024 yaitu. Mengembangkan Fasilitasi dan ruang-ruang Publik Ramah Perempuan dan Anak

A. Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

A.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I

Pelaksanaan Pembuatan Surat-menyurat dan SK Kegiatan

B. Sub. Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

B.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I

Melaksanakan Rapat Evaluasi KLA dalam rangka persiapan Penilaian KLA Berbasis Web Site

C. Sub. Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

C.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I

Melaksanakan Kunjungan dalam Rangka Pembinaan dan Persiapan Standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ke Kabupaten Tulang Bawang Barat

V. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan,

A. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi", Sub. Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

A.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data APE

B. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi", Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

B.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring terhadap Perempuan Kepala Keluarga dan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif di 3 KabupatenKab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus.

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi . Sub. Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan PerempuanKewenangan Provinsi.

A.a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pemantauan dan Pemeliharaan Tiang Baleho di 2 Kabupaten, Kab. Pesisir Barat

VI. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Pelaksanaan Rapat Intern Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Bina Keluarga PMI
- Sub. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Pelaksanaan Pelayanan dan Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- .
- 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Pelaksanaan Penjemputan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- 3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.
- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Kegiatan Penanganan Medis Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di R.S Abdul Moeloek berupa Layanan Medis Psikologi, Visum dan Obat-obatan..

VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins, Sub. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Program ini sesuai dengan agenda kerja utama ke 21 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2023 yaitu Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga

- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi dan Belanja Souvenir

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provins,

- Sub. Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Belanja Administrasi Kegiatan

- **Sub. Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi**
 - a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Belanja Administrasi Kegiatan, Srat menyurat dan Pembuatan SK Kegiatan

IX. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Program Perlindungan Khusus Anak, Program ini sesuai dengan Agenda Kerja Utama Ke 21 Gubernur/Wakil Gubernur Lampung TA 2023 yaitu. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.

- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Proses Adinistrasi Surat-menyurat dan Pembuatan SK dan Belanja Sovenir.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

B. Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi

- a. Pelaksanaan kegiatan Triwulan ke I
Adm Kegiatan, Fotocopy dan Pembuatan Surat-menyuratPelaksanaan kegiatan Triwulan ke II

Tabel 3.3
Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023

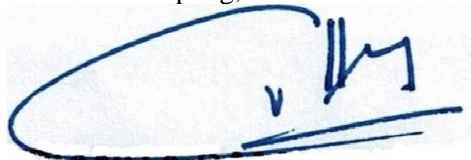
B A B IV

PENUTUP

Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja TA.2024 merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek (misalnya triwulanan). Evaluasi Rencana aksi sekurang-kurangnya memuat kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai kinerja beserta anggaran yang tersedia yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui berbagai kegiatan setiap tahun.

Demikian Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja TA.2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022.

Bandar Lampung, Januari 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several vertical and diagonal strokes on the right, all contained within a faint rectangular border.

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.S.i

NIP. 19600831 198103 2 004

**EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	1	
1	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	1	17,06%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum Terpenuhi (UNMMET NEED)	1	1,96%	1,96%	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	1	25,00%	25,00%			
			2	34,12%			2	3,92%				2	50,00%				
			3	51,18%			3	5,88%				3	75,00%				
			4	68,24%			4	7,85%				4	100,00%				
										Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	1			1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	1	25%	25%	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	1	25%	25%			
							2	50%				2	50%				
							3	75%				3	75%				
							4	100%				4	100%				
										Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	1			1	Rapat Intern Persiapan Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Provinsi Lampung Tahun 2024	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Laporan		4		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	25,00%	25,00%	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	1	25,00%	25,00%			
							2	50,00%				2	50,00%				
							3	75,00%				3	75,00%				
							4	100,00%				4	100,00%				
										Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitas, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	1			1	Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
										Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1				Rapat Intern Persiapan Sosialisasi Ketahanan Keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam upaya pencegahan Stunting	v
												2					
												3					

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I	
																	1
1																	
2	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	1	25%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1	25%	25%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	25%	25%			
			2	50%			2	50%				2	50%				
			3	75%			3	75%				3	75%				
			4	100,00%			4	100%				4	100%				
										Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	1			1	Rapat Persiapan Pengukuhan dan Pembinaan Forum Anak Daerah Tingkat Desa Tahun 2023	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
										Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak kewenangan Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	1			1	Rapat Evaluasi KLA dalam rangka persiapan Penilaian KLA Berbasis Web Site	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
										Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE pemenuhan hak anak	1			1	Rapat Persiapan Pelatihan Tenaga Layanan Konselor Pisat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) se Provinsi Lampung.	v
												2			2		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
3	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1	0,80%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	1	25%	25%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi'	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG	1	25%	25%			
			2	1,60%			2	50%				2	50%				
			3	2,40%			3	75%				3	75%				
			4	3,20%			4	100%				4	100%				
										Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	1			1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data APE	v
												2			2		
												3			3		
												4	49 Perangkat Daerah		4		
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi'	Persentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga	1	25,00%	25,00%			
												2	50,00%				
												3	75,00%				
												4	100,00%				
										Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	1			1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimtek di 15 Kabupaten	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA	1	6,67%	6,67%		
												2	13,34%			
												3	20,01%			
												4	26,70%			
										Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1			Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pemantauan dan Pemeliharaan Tiang Baleho di 2 Kabupaten, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Mesuji	v
												2				
												3				
												4	1 Dokumen			
4	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	1	25%	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapat Pelayanan/Pendampingan	1	25%	25%	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	25%	25%		
			2	50%			2	50%				2	50%			
			3	75%			3	75%				3	75%			
			4	100%			4	100%				4	100%			
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	1			1 Pelaksanaan Rapat Intern Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Bina Keluarga PM	v
												2			2	
												3			3	
												4	1 Dokumen		4	
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	1	4 Kab/Kota		1 Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I	
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
												2	8 Kab/Kota		2	Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v
												3	12 Kab/Kota		3	Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v
												4	15 Kab/Kota		4	Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v
										Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi	1	10 Layanan	11 Layanan	1	Pelaksanaan Penjemputan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v
												2	15 Layanan		2		
												3	25 layanan		3		
												4	50 Layanan		4		
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah penanganan medis bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	1				Penanganan Medis Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di R.S Abdul Moeleok berupa Layanan Medis Psikologi, Visum dan Obat-obatan.	v
												2					
												3					

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
												4	1 laporan				
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab./Kota yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	1	25%	25%	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga	1	25%	25%			
							2	50%				2	50%				
							3	75%				3	75%				
							4	100%				4	100%				
										Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	1			1	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi dan Belanja Souvenir	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 laporan		4		
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Kab./Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date.	1	25%	25%	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provins	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak	1	25%	25%			
							2	50%				2	50%				
							3	75%				3	75%				
							4	100%				4	100%				
										Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	1			1	Rapat Intern Persiapan Monitoring dan Evaluasi serta pembelajaran proses penginputan data Kekerasan pada Aplikasi SIMFONI PPA V.1	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
										Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	1			1	Belanja Administrasi Kegiatan, Surat menyurat dan Pembuatan SK Kegiatan	v
												2			2		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang mendapatkan Pelayanan/Pendampingan	1	0,43%	0,43%	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota peserta Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	1	25,00%	25,00%			
							2	0,86%				2	50%				
							3	1,29%				3	75%				
							4	1,75%				4	100%				
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	1			1	Pelaksanaan Rapat Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Program dan Kader PATBM di kabupaten	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I	
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
										Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	1			1	Rapat Intern Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Menejemen Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2023	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Dokumen		4		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah	1	25%	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	1	25%	25%			
							2	50%				2	50%				
							3	75%				3	75%				
							4	100%				4	100%				
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1	4 Dokumen		1	DPA Th 2024, PK Th.2024, LKJ Tahun 2023,	v
												2	8 Dokumen		2		
												3	12 Dokumen		3		
												4	17 Dokumen		4		
										Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN	1	77 orang		1	Terbayarnya Gaji PNS dari Bulan Januari s.d Bulan Maret Th.2024	v
												2	77 orang		2		
												3	77 orang		3		
												4	77 orang		4		
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	1 Dokumen		1	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dr Bln Januari s.d Maret 2024	
												2	2 Dokumen		2		
												3	3 Dokumen		3		
												4	4 Dokumen		4		
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	1 laporan		1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2	2 laporan		2		
												3	3 laporan		3		
												4	4 laporan		4		
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I	
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1			1	Pelaksanaan Laporan Aset Dinas PP dan PA TW I Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2			2		
												3			3		
												4	1 Laporan		4		
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1	Belanja Administrasi Kegiatan	v
												2	2 Dokumen		2		
												3	3 Dokumen		3		
												4	4 Dokumen		4		
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7 orang	7 orang	1	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v
												2	14 orang		2		
												3	22 orang		3		
												4	30 orang		4		
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	3 paket	3 paket	1	Tersedianya Perlatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dr Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2	6 paket		2		
												3	9 paket		3		
												4	12 paket		4		
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	30 unit	30 unit	1	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v
												2	60 unit		2		
												3	90 unit		3		
												4	120 unit		4		
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	3 paket	3 paket	1	Belanja Peralatan Rumah Tangga	v
												2	6 paket		2		
												3	9 paket		3		
												4	12 paket		4		
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	3 Ppaket	3 Ppaket	1	Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan	v
												2	6 paket		2		
												3	9 paket		3		
												4	12 paket		4		
										Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	3 paket	3 paket	1	Penyediaan Bahan / Matrial	v
												2	6 paket		2		
												3	9 paket		3		
												4	12 paket		4		
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	3 laporan	3 laporan	1	Penerimaan Kunjungan Tamu	v
												2	6 laporan		2		
												3	9 laporan		3		
												4	12 laporan		4		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN	I	
															1		2
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	3 laporan	3 laporan	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	v
												2	6 laporan		2		
												3	9 laporan		3		
												4	12 laporan		4		
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	1		-			v
												2	1 unit				
												3					
												4					
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	20 unit	20 unit	1	Penyediaan Peralatan dan Mesin untuk Penunjang Kebutuhan Kantor	v
												2	40 unit		2		
												3	60 unit		3		
												4	80 unit		4		
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	3 laporan	3 laporan	1	Penyediaan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik TW I Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2	6 laporan		2		
												3	9 laporan		3		
												4	12 laporan		4		
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	3 laporan	3 laporan	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dr Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2	6 laporan		2		

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	Realisasi	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	Realisasi	AKSI KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	
												3	9 laporan		3		
												4	12 laporan		4		
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	25%	25%			
												2	50%				
												3	75%				
												4	100%				
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	3 unit	3 unit	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan TW I Bln Januari s.d Maret 2024	v
												2	6 unit		2		
												3	8 unit		3		
												4	11 unit		4		
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	45 unit	45 unit	1	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v
												2	90 unit		2		
												3	135 unit		3		
												4	180 Unit		4		
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		-	1	-	v
												2	1 Gedung		2		
												3			3		
												4			4		

Bandar Lampung, Maret 2024
KEPALA DINAS,



Dr. FITRIANITA DAMHURI S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780419 199612 2 001